



# LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BANTUL 400172

• SEMESTER II TAHUN 2025 •



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Kata Pengantar

---



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Implikasinya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, melainkan juga meliputi seluruh aset yang dimiliki oleh negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai bagian penting dari kekayaan negara, BMN harus dikelola secara efektif dan efisien demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan BMN sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini disebabkan BMN adalah salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus terintegrasi dan transparan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Bantul, selaku salah satu unit Kuasa Pengguna Barang, berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. LBKP Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun Anggaran 2025 ini berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun Anggaran 2025 ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonstruksi Barang Milik Negara.



Dengan adanya penyusunan LKOP Pengabdian Negeri Bantul Semester II Tahun 2025, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami pelaksanaan EMN di Pengabdian Negeri Bantul. Laporan ini juga diharapkan bermanfaat bagi pimpinan Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pelaksanaan EMN.

Bantul, 27 Januari 2025

Sekretaris Pengabdian Negeri Bantul



ERLIN HERMANA



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Daftar Isi

---



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	2
B. Esensi Pelaporan	5
C. Periode Pelaporan	5
II. KEBERAKAN PENATAUSARAAN BARANG MILIK NEGARA	5
A. Kebijakan Penyragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi	7
B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar	10
C. Kebijakan Kapiteisasi BMN	11
D. Kebijakan Penyusutan BMN	12
E. Kebijakan Ekonsultasi Nilai BMN	14
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	15
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023	16
A. Saldo Awal	16
B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2023	16
V. BMN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL PER 31 DESEMBER 2023	31
A. BMN per Akun Negara	31
B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan	32
VI. INFORMASI BMN LAINNYA	32
A. Perkembangan Nilai BMN	32
B. Informasi Pengelolaan BMN	33
C. BMN Dari Dana Dekonsentrasi	35
D. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum	35
E. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain	36
F. BMN Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusnya kepada Pengelola Barang	36
G. BMN Berupa SDYSDG	36
H. Usulan Barang Hibah DK/TP	36
I. Asst Properti Investasi	36
J. Permasalahan Pelaksanaan Tatausahaan BMN	36
K. Pengungkapan Penting Lainnya	36



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Daftar Lampiran

---



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran Laporan Barang Pengguna :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data BMN
2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
3. Laporan Posisi BMN Di Neraca per 31 Desember 2025
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomtabel
6. Laporan Barang Ekstrakomtabel
7. Laporan Barang Cabang Intrakomtabel & Ekstrakomtabel
8. Laporan Penyusutan Intrakomtabel
9. Laporan Penyusutan Ekstrakomtabel
10. Laporan CRBMN
11. Catatan Atas Laporan BMN
12. Laporan PMSB
13. Laporan Pelaksanaan Pengecualian BMN
14. Laporan BMN Berupa Rumah Negara
15. Neraca Tingkat Setor per 31 Desember 2025
16. Neraca Percobaan (Basis Akrual)
17. Neraca Percobaan (Basis Kas)



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Berita Acara Rekonsiliasi Internal

---



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIRKTYORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Supomo, No. 4, Bantul, Dt. Yogyakarta 55711, Telp/Fax: (0274) 547348

Laman: www.pn.kemari.go.id, Email: amad@pn.kemari.go.id

**BERTAKARAKA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : 53/SEK/PN.W13-US/PL.1.26/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pengadilan Negeri Bantul, kami yang berkedudukan di bawah ini :

- I. Nama : Prasetyo, S.T  
 NIP : 9080124 201101 1 005  
 Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Prasetyo, S.T  
 NIP : 9080124 201101 1 005  
 Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (DMN) pada tingkat internal Pengadilan Negeri Bantul dengan cara membandingkan data DMN pada Laporan Barang Kusus Pengguna (LBKP) yang dibuat oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Rekapitulasi Kasus Pengguna Anggaran (RUKPA) yang dibuat oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut.

I. Hasil Rekonsiliasi Data DMN

No	Aksi Baraca	Nilai DMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2025		
		Buku Awal	Utang	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	PEROLEH BMM DI NEGARA	21.525.238.824	(1.447.720.820)	19.977.498.004
A	ASSET LABOUR	15.807.880	2.000.000	17.807.880
1	Persediaan	15.807.880	2.000.000	17.807.880
B	ASSET TITIPAN	21.513.255.229	(1.450.280.180)	19.962.975.049
1	Tanah	17.535.876.000	0	17.535.876.000
2	Persediaan dan Meubel	3.978.255.729	(1.245.000)	3.977.010.729
3	Perangko dan Stempel	1.999.123.500	0	1.999.123.500
4	Uang, Ingkuk dan Jangkan	0	0	0
5	ASSET LABOUR	46.342.061	0	46.342.061
6	Kontribusi Duitan Pengangan	0	0	0
7	Akiva Pengeluaran Asst Tahun	(5.212.860.000)	(1.450.280.180)	(6.663.140.180)
C	ASSET LABOURYA	0	0	0
1	Kelebihan Duitan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Salah Titip Barang	0	0	0
3	Asst Labour	0	0	0
4	Akiva Pengeluaran Asst Labourya	0	0	0
B	BMM BUKU NEGARA	24.294.876,46	(2.260.220)	22.034.656,46
A	SIKSI KAPROK/ASBL	10.288.879	(2.260.220)	8.028.659
1	SIKSI Ekstrajudisial	21.079.156	700.000	21.779.156
2	Akiva Pengeluaran Ekstrajudisial	(12.790.276)	(2.260.220)	(15.050.496)
B	SPYND	0	0	0
C	INSTRUKSI BILAU	0	0	0
D	BAKUPERSI SYAS BUKAT	0	0	0
TOTAL (1 + B)		21.538.834.414	(1.450.180.880)	19.988.653.534

5. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester II Tahun Anggaran 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Prabowo

Pihak Kedua,



Prabowo





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Rekapitulasi Saldo Awal

---





**15. DATA TRANSKSI DAN NON TRANSKSI**

**A. METAS LAINNYA EMV**

NO	PERINCIAN/REKAM	SIKUS PERANGKAT	KUANTITAS	REKAM
01	01	01	01	01
1	EMV	EMV (Merk)		
		EMV (Merk)		
		EMV (Merk)		
2	Perangkat Lunak	Perangkat Lunak		
		Perangkat Lunak		
		Perangkat Lunak		
3	EMV	EMV		
	TOTAL			0

**B. METAS KONTAK EMV**

NO	PERINCIAN/REKAM	SIKUS PERANGKAT	KUANTITAS	REKAM
01	01	01	01	01
1	EMV	EMV (Merk)		
		EMV (Merk)		
		EMV (Merk)		
2	Perangkat Lunak	Perangkat Lunak		
		Perangkat Lunak		
		Perangkat Lunak		
3	EMV	EMV		
	TOTAL			0

**C. PERANGKAT EMV**

NO	PERINCIAN/REKAM	SIKUS PERANGKAT	REKAM
01	01	01	01
1	Perangkat Lunak	Perangkat Lunak	-
2	Perangkat Lunak	Perangkat Lunak	-
3	Perangkat Lunak	Perangkat Lunak	-
4	Perangkat Lunak	Perangkat Lunak	-
5	Perangkat Lunak	Perangkat Lunak	-
			-
			-
			-
			-
			-
	TOTAL		-

**16. PERANGKAT MELAYU BUKAN EMV (NEMV) PENGOLOMOKAN EMV**

Jumlah Perangkitan Melayu Bukan EMV (NEMV) yang terdapat dari kelompok EMV pada periode Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 5.731.307 - (Detailnya lihat tabel dibawah ini) dan ini adalah data awal pada saat ini.

**16. PERANGKAT MELAYU BUKAN EMV**

Data awal periode Semester I Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat selisih antara periode dan EMV sebesar Rp. 207.441.310.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Posisi BMN di Neraca - Saldo Awal

Posisi per tanggal 01 Januari Tahun  
Anggaran 2025

**LAPORAN POS B BERBARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POS B PER TAHUNAN 01 JANUARI 2026 (BALDO AWAL)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

UANG : 001                      MENTERI AGUNG  
 UANG : 48171                PENGADILAN NEGARA SATEL

Tanggal : 27-01-24 2:01 PM  
 Halaman : 1

Kode Lap : 00\_000\_0000\_0000\_000

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
11711	Barang Konsumsi	13,555,950
11713	Bahan untuk Pemeliharaan	1,320,200
13111	Tanah	17,638,990,000
13211	Peralatan dan Mesin	3,896,203,700
13311	Gedung dan Bangunan	7,562,706,290
13512	Aset Tetap Lainnya	48,342,000
13711	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,410,998,250)
13721	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,821,688,268)
<b>JUMLAH</b>		<b>21,828,058,000</b>



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Posisi BMN di Neraca

Posisi per tanggal 31 Desember Tahun 2025

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
TAHUN ANGGARAN 2023**

UANG : RMB      BUKLAWAH ADUNG  
 UANG : RMB19      PENGAJARAN KESER BARTUA

Tgl Data : 27/01/2024 09:40 AM  
 Tgl Cetak : 27/01/2024 09:40 AM  
 Halaman : 1  
 File Cetak : lap\_posn\_neraca\_posn\_posn\_posn\_posn\_posn

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
11111	Barang Konsumsi	11.359.475
11112	Bahan untuk Pemeliharaan	969.300
13111	Tanah	17.633.690.000
13211	Peralatan dan Mesin	3.993.743.709
13311	Gedung dan Bangunan	7.262.708.290
13612	Aset Tetap Lainnya	43.342.063
13711	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.590.579.113)
13721	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.104.738.185)
<b>J U M L A H</b>		<b>19.871.499.134</b>

Bertek, 27 Januari 2024

Penganggung Jarak UMRP  
 Wakil Pengarah Barang





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Barang Persediaan

Per 31 Desember 2025

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

UNIT : 001                      MENTERI AGUNG  
SARUNG : 00101                PENGADILAN NEGARA SAMPAL

Tgl Data : 27/01/20 8:38 AM  
Tanggal : 27/01/20 8:38 AM  
Revisi : 1  
KIDP LAP : 160\_001\_0001\_00001\_001

Kode	Uraian	Jumlah
00101	<b>Barang Konsumsi</b>	
00101001	Ane Tula	213,000
00101002	Tripa Tula, Tripa Sempak	11,000
00101003	Pengupul Panas	30,000
00101004	Pengupul/Homster	40,000
00101005	Buku Tula	2000,000
00101006	Onher Das Map	3300,000
00101007	Penggerak	2,000
00101008	Cadangan Tula Kantor	10,000
00101009	Ane Penda	20,000
00101010	Seapel	10,000
00101011	Ac/Spoker	100,000
00101012	Ane Tula Kantor Lainnya	10,000
00101013	Kertas/HVS	2000,000
00101014	Berkas/Mapa	100,000
00101015	Amplip	200,000
00101016	Kertas Das Cover Lainnya	300,000
00101017	Buku Sempak	10,000
00101018	Ane Perundang/Regulasi/Kantor Lainnya	100,000
00101019	Membakar Untuk Regulasi Kantor Lainnya	10,000
<b>Jumlah Barang Konsumsi</b>		<b>11,000,470</b>
00102	<b>Bahan untuk Pemeliharaan</b>	
00102001	Das/Das Sempak	100,000
00102002	Mesin/Das Das Map	100,000
00102003	Tripa, Sempak, Das Tempak/Lainnya	200,000
00102004	Koran Das Tempak Sempak	100,000
00102005	Bahan Sempak Untuk Pemeliharaan	100,000
00102006	Pengharan Ruang	5,000
<b>Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan</b>		<b>600,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12,500,470</b>

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp.                      0 dalam kondisi rusak.  
2. Persediaan senilai Rp.                      0 dalam kondisi usang.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Barang Intrakomptabel

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025





**LAPORAN SURVEI PERSALINAN  
DISTRIBUSI AIR  
TANJANG PEGAS KEC. KULU DISTRIK LAMPUNG UTARA  
SALURAN AIRBANGUN TANJANG PEGAS 21 FEBRUARI 2012**

LOKASI : TANJANG PEGAS  
 ALAT : PASUKAN SURVEI AIRBANGUN

Tgl Peng : 21/02/2012  
 Tgl Peng : 21/02/2012  
 No. Peng : 1  
 No. Peng : 01/02/2012/001/2012

No	Nama	No	Kategori		Kategori		Kategori	
			1	2	3	4	5	6
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								


  
 Kepala Dinas Air  
 Dinas Air  
 Kabupaten Lampung Utara  
 Tanjung Pegas



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Barang Ekstrakomptabel

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

**REPUBLIC OF INDONESIA**  
**MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE**  
**GENERAL DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION**  
**STATE UNIVERSITY OF PADJARAN (UNPAD)**

DATE: \_\_\_\_\_  
 NO: \_\_\_\_\_  
 SUBJECT: \_\_\_\_\_

TO: \_\_\_\_\_  
 FROM: \_\_\_\_\_  
 RE: \_\_\_\_\_

No	Name	NIM	Personal Information		Academic Information				Administrative Information	
			Gender	Age	Program	Year	Semester	Grade	Signature	Date
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
11	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
12	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
14	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
15	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
16	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
17	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
18	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
19	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
20	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
21	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
22	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
23	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
24	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
25	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
26	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
27	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
28	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
29	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
32	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
33	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
34	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
35	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
36	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
37	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
38	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
39	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
40	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
41	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
42	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
43	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
44	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
45	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
46	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
47	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
48	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
49	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
50	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____


  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Barang Gabungan

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025









Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Penyusutan Intrakomptabel

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025





**LAPORAN KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN  
KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN  
KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN  
KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN**

**NO. SURAT:** 001/2024  
**TANGGAL:** 15/01/2024

**DI:** Kantor Kepala Sekolah  
**DAFTAR:** 100/001/2024  
**REVISI:** 0  
**TANGGAL:** 15/01/2024

No	Judul	Jenis	Kategori				Status
			1	2	3	4	
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>


  
 Kepala Sekolah  
 NAMA KEPALA SEKOLAH  
 NAMA KEPALA SEKOLAH  
 NAMA KEPALA SEKOLAH



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PADJARAN  
REKAPITULASI DATA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PERIODE TAHUN 2014/2015**

LOKASI : ...  
 WAKTU : ...  
 NAMA : ...

TITLE : ...  
 AUTHOR : ...  
 JOURNAL : ...  
 YEAR : ...

INFORMASI PENELITIAN			INFORMASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
NO	JUDUL	TAHUN	LOKASI	WAKTU	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...


  
 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
 Universitas Padjaran  
 ...  
 ...



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan CRBMN

---

Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025















KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 LAPORAN HASIL PENELITIAN TENTANG...

Tanggal: .....  
 Nomor: .....  
 Seri: .....

Nama: .....  
 Tempat: .....

No	Jenis Penelitian	Jumlah	Kategori		Sub-kategori		Sub-sub-kategori	
			A	B	C	D	E	F
1	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
2	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
3	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
4	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
5	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
6	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
7	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
8	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
9	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
10	Penelitian Tindakan Kelas	1	1	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>				<b>10</b>				

Ditandatangani oleh  
 Kepala Pusat Penelitian  
 dan Pengembangan  
 Pendidikan Dasar dan Menengah  
  
 Kepala Pusat Penelitian  
 dan Pengembangan  
 Pendidikan Dasar dan Menengah



NATIONAL HEALTH SERVICE  
 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR  
 ENDING 31 MARCH 2011

Part 1: Summary of the financial statements  
 for the year ending 31 March 2011

Page: 1 of 1  
 Date: 11/03/11  
 Time: 10:00:00 AM

Part 1: Summary of the financial statements		Part 2: Summary of the financial statements		Part 3: Summary of the financial statements		Part 4: Summary of the financial statements	
Year	Amount	Year	Amount	Year	Amount	Year	Amount
2010	0	2010	0	2010	0	2010	0
Total		Total		Total		Total	
			1,000,000,000		1,000,000,000		0

Date: 11/03/11  
 Name: [Signature]  
 Title: [Signature]  
 Department: [Signature]







Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaBMN)

---



## 1. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbaiki melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Bantul, sebagai salah satu satuan kerja dan Mahkamah Agung yang berperan sebagai Rucas Pengguna BMN, diwajibkan untuk menyusun LBNP secara berkala, baik LBNP Semesteran maupun LBNP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Bantul dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



## A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapansteraan dan Kasekretariat Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Segan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;



- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Ribah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.06/2019 tentang Pengeluaran Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 25) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modal Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modal Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modal Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 30) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 31) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2021 tentang Penataharian Kodifikasi Segmen Akun pada Ragan Akun Standar; dan
- 32) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XI/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akural dan Pelaporan Keuangan.



## B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan BMN, setiap instansi pemerintah yang bertradisi sebagai Pengguna BMN diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP). Dalam menyusun LBP, Mahkamah Agung mengikuti jenjang pelaporan struktural yang berlaku mulai dari tingkat Satker (1846 UAKPB), Komisi (137 UAPPB-W), Eselon I (7 UAPPB-EI), hingga Kementerian/Lembaga (1 UAPB).

LBP Pengadilan Negeri Santal Semester II Tahun 2025 menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik yang termasuk kategori intrakomptabel (memenuhi syarat kapabilitas) maupun ekstrakomptabel berdasarkan penggolongan, kodefikasi, dan akun neraca yang diatur dalam peraturan terkait. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Santal.

## C. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Pengguna Kuasa Pengguna Semester II Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai seluruh barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya, BMN ada yang dikategorikan sebagai aset lancar maupun aset tetap.

Pengkatagorian ini memiliki peran penting dalam menyajikan nilai BMN secara transparan dan akuntabel dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKGL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). BMN digolongkan sebagai aset lancar apabila diharapkan akan segera digunakan atau dijual dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi syarat ini akan diperlakukan sebagai



## Persediaan

Sementara itu, BMN dikategorikan sebagai aset tetap jika memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak ditujukan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun untuk tujuan penggunaan. Aset tetap BMN mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Dengan masa manfaat yang panjang, aset tetap BMN menjadi komponen krusial dalam pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

BMN yang telah diperoleh harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin melalui pelaporan BMN secara berkala dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sistematis ini dikenal sebagai penatausahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.

Penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dan kebalutruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman tercapai jika informasi



disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN

#### A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBKP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kardex pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Pemberian kode BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan utama, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Meub. Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Setiap golongan kemudian dibagi lagi menjadi bidang, kelompok,



subkelompok, dan sub-sub kelompok untuk memastikan klasifikasi yang lebih detail dan terstruktur.

Pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja), pelaporan BMN diatur mulai dari golongan barang hingga sub-sub kelompok barang. Sementara itu, pada tingkat wilayah dan/atau Eselon I, pelaporan dilakukan mulai dari golongan hingga sub kelompok barang. Adapun pada tingkat Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga), laporan hanya mencakup dari golongan hingga kelompok barang.

Pemahaman mengenai hal ini diawali dengan mengenali fungsi suatu barang, apakah sesuai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi (tupf) organisasi, yang tentu saja berbeda di setiap Kementerian/Lembaga. Masalah yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman bahwa setiap barang harus diklasifikasikan secara rinci berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, hingga sub-sub kelompok.

1 - Persediaan  
2 - Tanah  
3 - Peralatan dan Meubel  
4 - Gedung dan Bangunan  
5 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
6 - Aset Tetap Lainnya  
7 - Konstruksi Dalam Pengerjaan  
8 - Aset Tak Berwujud

**DAFTAR KODE BARANG**

Kode	Barang
3	Meubel
3.01	Meubel
3.01.01	Kursi
3.01.02	Kursi
3.01.03	Kursi
3.01.04	Kursi
3.01.05	Kursi
3.01.06	Kursi
3.01.07	Kursi
3.01.08	Kursi
3.01.09	Kursi
3.01.10	Kursi
3.01.11	Kursi
3.01.12	Kursi
3.01.13	Kursi
3.01.14	Kursi
3.01.15	Kursi
3.01.16	Kursi
3.01.17	Kursi
3.01.18	Kursi
3.01.19	Kursi
3.01.20	Kursi
3.01.21	Kursi
3.01.22	Kursi
3.01.23	Kursi
3.01.24	Kursi
3.01.25	Kursi
3.01.26	Kursi
3.01.27	Kursi
3.01.28	Kursi
3.01.29	Kursi
3.01.30	Kursi
3.01.31	Kursi
3.01.32	Kursi
3.01.33	Kursi
3.01.34	Kursi
3.01.35	Kursi
3.01.36	Kursi
3.01.37	Kursi
3.01.38	Kursi
3.01.39	Kursi
3.01.40	Kursi
3.01.41	Kursi
3.01.42	Kursi
3.01.43	Kursi
3.01.44	Kursi
3.01.45	Kursi
3.01.46	Kursi
3.01.47	Kursi
3.01.48	Kursi
3.01.49	Kursi
3.01.50	Kursi
3.01.51	Kursi
3.01.52	Kursi
3.01.53	Kursi
3.01.54	Kursi
3.01.55	Kursi
3.01.56	Kursi
3.01.57	Kursi
3.01.58	Kursi
3.01.59	Kursi
3.01.60	Kursi
3.01.61	Kursi
3.01.62	Kursi
3.01.63	Kursi
3.01.64	Kursi
3.01.65	Kursi
3.01.66	Kursi
3.01.67	Kursi
3.01.68	Kursi
3.01.69	Kursi
3.01.70	Kursi
3.01.71	Kursi
3.01.72	Kursi
3.01.73	Kursi
3.01.74	Kursi
3.01.75	Kursi
3.01.76	Kursi
3.01.77	Kursi
3.01.78	Kursi
3.01.79	Kursi
3.01.80	Kursi
3.01.81	Kursi
3.01.82	Kursi
3.01.83	Kursi
3.01.84	Kursi
3.01.85	Kursi
3.01.86	Kursi
3.01.87	Kursi
3.01.88	Kursi
3.01.89	Kursi
3.01.90	Kursi
3.01.91	Kursi
3.01.92	Kursi
3.01.93	Kursi
3.01.94	Kursi
3.01.95	Kursi
3.01.96	Kursi
3.01.97	Kursi
3.01.98	Kursi
3.01.99	Kursi
3.01.100	Kursi

Gambar 1. Penjelasan Kodeklasi BMN

Sebagai contoh, ketika melakukan pengreputan aset berupa "perangkat komputer" pada aplikasi SAKTI, terdapat 2 (dua) pilihan kode barang, yaitu:

1. Personal Komputer (3.08.XXXX.XXX)
2. P.C Unit (3.10.XXXXXXX)





Gambar 2: Kebijakan Kodifikasi BMN untuk Persediaan di Mahkamah Agung

Masing Masing BMN Entitas Persediaan (tan Meas)		
301 Persediaan	302 Persediaan	303 Persediaan Lainnya
301.1 Bahan Baku	302.1 Bahan Baku	303.1 Bahan Baku
301.2 Bahan Baku	302.2 Bahan Baku	303.2 Bahan Baku
301.3 Bahan Baku	302.3 Bahan Baku	303.3 Bahan Baku
301.4 Bahan Baku	302.4 Bahan Baku	303.4 Bahan Baku
301.5 Bahan Baku	302.5 Bahan Baku	303.5 Bahan Baku
301.6 Bahan Baku	302.6 Bahan Baku	303.6 Bahan Baku
301.7 Bahan Baku	302.7 Bahan Baku	303.7 Bahan Baku

Gambar 3: Kebijakan Kodifikasi BMN untuk Peralatan dan Meas di Mahkamah Agung

## B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Ragan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LRAFP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Bantul. Oleh karena itu, pelaporan BMN harus disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodifikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Ragan Akun Standar.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Meas, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap,



atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBMF diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

### C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jembatan, koleksi perpustakaan, dan barang berwujud seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (satu rupiah) atau lebih.



Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

Penerapan batasan kapitalisasi ini mengacu pada prinsip materialitas dalam akuntansi BMN dengan nilai di bawah batas tertentu dianggap tidak material dan cukup dilaporkan dalam CaLK. Sementara itu, BMN dengan nilai material di atas batas tersebut harus dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset dalam Neraca agar posisi keuangan pemerintah dapat tercermin secara akurat.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek *cost-benefit* guna menghindari penyajian BMN yang terlalu rinci, yang dapat menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat informasi yang signifikan. Dengan demikian, pengelolaan BMN, baik yang dikapitalisasi maupun tidak, dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

#### D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Bantul, dalam LEMF Semester II Tahun 2025, telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PJMK/06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.



4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 329/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung penerapan kebijakan penyusutan Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 329/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi instansi pemerintah pusat dalam menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Paket kebijakan tentang penyusutan Barang Milik Negara (BMN) menjelaskan serangkaian langkah yang wajib diikuti oleh entitas pemerintah pusat, khususnya dalam hal menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan penyusutan aset tetap. Paket ini juga dilengkapi dengan contoh kasus yang mencakup pemilihan masa manfaat, perhitungan penyusutan, hingga pengungkapannya dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CREMN).

Ketersediaan paket kebijakan ini sangat penting untuk memastikan penerapan penyusutan aset tetap BMN secara seragam dan konsisten di seluruh instansi pemerintah pusat. Dengan demikian, informasi penyusutan yang dihasilkan akan lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan penyajian penyusutan. Dengan mematuhi pedoman ini secara disiplin, petugas pengelola BMN di setiap instansi dapat



menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam menjaga aset negara yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan BMN memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan aset tetap BMN yang terhut, etiken, optimal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan dan aset negara demi kepentingan bangsa dan negara. Penerapan penyusutan aset tetap BMN sangat penting untuk mencerminkan nilai aset tetap yang sebenarnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Laporan Keuangan. Informasi penyusutan juga sangat diperlukan untuk perencanaan penggantian aset tetap yang telah habis masa manfaatnya.

Dengan mematuhi ketentuan penyusutan yang berlaku, pengelolaan aset tetap BMN menjadi lebih teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang baik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN.

#### E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara.

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADENA (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.



The screenshot displays a web application interface with a table for reconciliation. The table has several columns, including 'Kategori', 'Kode', 'Uraian', 'Saldo Awal', 'Saldo Akhir', and 'Saldo Akhir (Koreksi)'. The rows contain numerical data representing financial values. The interface includes a sidebar on the left and a top navigation bar.

Gambar 4. Rekonsiliasi Nilai BMN melalui aplikasi E-SADENA

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul. Nilai BMN gabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Semester II Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebesar Rp29.382.261.207,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp29.549.021.207,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) dengan nilai mutasi tambah sebesar Rp14.556.556.290,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan mutasi pengurangan sebesar Rp 14.543.316.290,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terjadi selama Semester II Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan



selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Pelaksanaan Internal Data BMN
2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Penyusutan;
7. Laporan Penyusutan Intrakomptabel;
8. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel;
9. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN);
10. Laporan FNERP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
11. Laporan Pelaksanaan Penganggaran BMN; dan
12. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

##### A. Saldo Awal

Nilai Saldo awal BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2025 per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp29.569.021.207,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp29.345.942.057,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp22.079.150,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

##### B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2025

Mutasi Barang Milik Negara Periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

##### 1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pongadilan Negeri bertal sebesar Rp12.525.775,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari



saldo awal sebesar Rp15.081.300,00 (lima belas juta delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp81.894.894,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp84.430.079,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

Mutasi Barang Persediaan dapat ditelaah pada tabel berikut:

Saldo Awal 2023		Rp 15.081.300,00
<b>Mutasi Tambah :</b>		
M10	Pembelian	Rp 81.894.894,00
M12	Transfer Masuk Online	-
M10	Correk Nilai Tambah	-
M10	Reklasifikasi Masuk	-
M11	Reklasifikasi Dari Aset	-
M10	Correk Transfer Keluar Online	-
M14	hibah (Masuk)	-
M10	Batal Dapat Uang Rusak	-
M10	Perolehan Lainnya	-
M10	Correk kuantitas tambah	-
M10	Saldo Awal	-
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>Rp 81.894.894,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>		
K08	Rusak	-
K08	Keluar Lainnya	-
K00	Correk Nilai Kurang	-
K04	Usang	-
K11	Reklasifikasi ke Aset	-
K01	hasil Operasi Risk	-
K10	Reklasifikasi Keluar	-
K09	Correk Kuantitas Kurang	-
K10	Transfer Keluar Online	-
K01	hibah Pakai	Rp 84.430.079,00
<b>Mutasi Berkurang</b>		<b>Rp 84.430.079,00</b>
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>		<b>Rp 12.525.779,00</b>

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Penyajian persediaan per 31 Desember 2023 sudah melalui proses pelaksanaan pemeriksaan fisik (stock opname) dan dalam kondisi baik, rusak, dan usang.



## 2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kussa Pengguna Pengadilan Negeri Periode 31 Desember 2015 seluas 5.895 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp17.638.690.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 5.895 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp17.638.690.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp7.266.599.000,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp7.266.599.000,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intakompetensi	Diatkomentasi
<b>Saldo Awal</b>			
000	Saldo Awal TATL	Rp 17.638.690.000,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Bertambah</b>			
100	Saldo Awal	Rp 0,00	Rp 0,00
103	Pembelian	Rp 0,00	Rp 0,00
102	Transfer Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
105	Hibah Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 7.266.599.000,00	Rp 0,00
112	Peralihan lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
204	Correkt Penetapan Nilai Bertambah	Rp 0,00	Rp 0,00
208	Pengembangan Melalui COP	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 7.266.599.000,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Berkurang</b>			
214	Correkt Suaiian	Rp 0,00	Rp 0,00
264	Correkt Penetapan Nilai Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
302	Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
305	Hibah Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
304	Reklasifikasi Keluar	(Rp 7.266.599.000,00)	Rp 0,00
308	Correkt Penetapan	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 7.266.599.000,00)	Rp 0,00
<b>Saldo</b>		<b>Rp 17.638.690.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
<b>Total (Saldo + Akumulasi Penyusutan)</b>		<b>Rp 17.638.690.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Tabel 2. Rincian Mutasi Tanah

Penjelasan terhadap rincian transaksi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat Reklasifikasi masuk untuk memindahkan Surat Plh Kepala Biro Perengkapan Nomor 203/BUA.4/PLH.2.5/V/2015 perlu dilakukan



perubahan kodefikasi barang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KM.14/2014. Transaksi ini dilakukan sebagai pasangan reklasifikasi keluar dalam rangka penyesuaian kodefikasi tanah sesuai dengan fungsinya;

- b. Reklasifikasi Keluar perbaikan atas perubahan kodefikasi barang yang selanjutnya melakukan Reklasifikasi Masuk;

### 3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025 sebanyak 831 buah dengan nilai sebesar Rp1.932.322.855,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 826 buah dengan nilai sebesar Rp2.919.282.855,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2025 sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp25.780.000,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Pembelian kursi besi/metal sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Terdapat Transfer Masuk dan Badan Urusan Administrasi dengan dokumen pendukung BAST Nomor 203/WJA.7/BAST.PL1.2.1/VI/2025 tanggal 18 Juli 2025 sebanyak 3 (tiga) unit s.d.e sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. Terdapat Reklasifikasi Keluar (Sisa) berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Nomor 310/SEK.FK.W13-U5/SKET.PL1.2/DK/2025 tanggal 17 September 2025 sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- d. Terdapat Reklasifikasi Masuk (Sisa) berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Nomor 310/SEK.FK.W13-U5/SKET.PL1.2/DK/2025 tanggal 17 September 2025 sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).



Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo awal T&L	Rp 2.800.300.700,00	Rp 28.070.000,00
Mutasi Bertambah			
100	Saldo awal	Rp 0,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 0,00	Rp 700.000,00
102	Penjualan lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
103	Hutang Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
104	Transfer Masuk	Rp 12.500.000,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 12.500.000,00	Rp 0,00
200	Pengembangan Modal Jelas Langsung	Rp 0,00	Rp 0,00
400	Penggunaan kembali Aset yang sudah dihindarkan penggunaan aset	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penyediaan Tambanguran Dengan KDP	Rp 0,00	Rp 0,00
104	Pembelian Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
108	Asal Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
200	Kontrol Pencatatan Modal Bertambah	Rp 0,00	Rp 0,00
102	Penyediaan Tambanguran Langsung	Rp 0,00	Rp 0,00
110	Reklasifikasi Masuk dari Penyediaan	Rp 0,00	Rp 0,00
200	Pengembangan Melalui KDP	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penjualan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penjualan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penjualan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 25.000.000,00	Rp 700.000,00
Mutasi Berkurang			
300	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	Rp 0,00	Rp 0,00
302	Reklasifikasi Keluar ke Penyediaan	Rp 0,00	Rp 0,00
303	Kontrol Manual	Rp 0,00	Rp 0,00
305	Kontrol Pencatatan	Rp 0,00	Rp 0,00
306	Reklasifikasi Keluar	Rp 12.500.000,00	Rp 0,00
300	Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
304	Kontrol Pencatatan Modal Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penghapusan Aset Dari Penggunaan	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		Rp 12.500.000,00	Rp 0,00
Saldo		Rp 2.800.300.700,00	Rp 28.770.000,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 2.990.979.910,00)	(Rp 24.815.400,00)

Tabel 3. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Penjelasan terhadap rincian transaksi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- a. Pembelian Peralatan Mesin sebanyak 2 (dua) buah berupa karu besi/metal, merupakan pengadaan peralatan mesin yang sumber pembayarannya dari APBN;



- b. Transfer Masuk Peralatan Mesin sebanyak 3 (tiga) buah berupa sofa, merupakan transfer masuk dari Badan Urusan Administrasi.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Tidak terdapat alat besar (3.01) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KRI	ALAT ANGIKUTAN	SALDO AWAL PERIODE		MUTASI PERIODE		SALDO AKHIR PERIODE	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
	Saldo Awal Periode 2024	13	886.000.000	13	886.000.000	0	0
	Saldo Awal Periode 2025	13	886.000.000	13	886.000.000	0	0
	Mutasi Tambah						
	110. Gada Baru	0	0	0	0	0	0
	111. Perbaikan	0	0	0	0	0	0
	112. Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
	113. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	114. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	115. Pengadaan Kebutuhan Barang	0	0	0	0	0	0
	116. Pembelian Sewa Sewa	0	0	0	0	0	0
	117. Pengalihan Gada	0	0	0	0	0	0
	118. Pengalihan Gada	0	0	0	0	0	0
	119. Gada Transfer Gada	0	0	0	0	0	0
	120. Pengalihan Gada dan (Lampung)	0	0	0	0	0	0
	121. Gada Perawatan dan Perbaikan	0	0	0	0	0	0
	122. Pengalihan Gada dan (Lampung)	0	0	0	0	0	0
	123. Pengalihan Gada dan (Lampung)	0	0	0	0	0	0
	Mutasi Kurang						
	210. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	211. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	212. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	213. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	214. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	215. Pengalihan Gada dan Perbaikan	0	0	0	0	0	0
	216. Pengalihan Gada dan Perbaikan	0	0	0	0	0	0
	Saldo Akhir Periode	13	886.000.000	13	886.000.000	0	0

Tabel 4. Rincian Mutasi Alat Angkutan

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak terdapat Alat Pertanian (3.04) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.



5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KODE	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	WISUDA 2025 & BUKAN WISUDA 2025		MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG	
		QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI
	Saldo Awal 1 Januari 2024	071	1.810.887.887	000	0.000.000.000	00	0.000.000.000
	Saldo Awal 1 Januari 2025	007	1.807.887.887	000	0.000.000.000	00	0.000.000.000
	Mutasi Tambah						
	001. Beban Gaji	0	0	0	0	0	0
	001. Beban Gaji	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer Tidak	0	0	0	0	0	0
	001. Mutasi Tidak	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000
	Mutasi Kurang						
	001. Gajian Pegawai	0	0	0	0	0	0
	001. Gajian Pegawai Tetap	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer Tidak	0	0	0	0	0	0
	001. Mutasi Tidak	0	0	0	0	0	0
	001. Gajian Pegawai	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000

Tabel 5. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KODE	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	WISUDA 2025 & BUKAN WISUDA 2025		MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG	
		QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI
	Saldo Awal 1 Januari 2024	00	0.000.000.000	00	0.000.000.000	00	0.000.000.000
	Saldo Awal 1 Januari 2025	00	0.000.000.000	00	0.000.000.000	00	0.000.000.000
	Mutasi Tambah						
	001. Beban Gaji	0	0	0	0	0	0
	001. Beban Gaji	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer Tidak	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000
	Mutasi Kurang						
	001. Gajian Pegawai Tetap	0	0	0	0	0	0
	001. Gajian Pegawai Tetap Berkurang	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer	0	0	0	0	0	0
	001. Transfer Tidak	0	0	0	0	0	0
	001. Gajian Pegawai	0	0	0	0	0	0
	001. Gajian Pegawai	0	0	0	0	0	0
	001. Mutasi Tidak	0	0	0	0	0	0
	001. Mutasi Tidak	0	0	0	0	0	0
	001. Penghasilan User dan Pemuncaran	0	0	0	0	0	0
	001. Penghasilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000	0	0.000.000.000

Tabel 6. Rincian Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar



7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2023.

8) Alat Laboratorium (3.08)

Tidak terdapat Alat Laboratorium (3.08) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2023.

9) Alat Peralatan (3.09)

Tidak terdapat Alat Peralatan (3.09) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2023.

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer (3.10) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2023 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

K/L	KETERANGAN	MUTASI PERKURANGAN		MUTASI TAMBAH		SALDO PERKURANGAN	
		DEKRETA	RUANG	DEKRETA	RUANG	DEKRETA	RUANG
	Saldo per 31 Desember 2022	120	1.677.931.620	120	1.678.931.620	0	1.678.931.620
	Saldo per 1 Januari 2023	120	1.677.931.620	120	1.678.931.620	0	1.678.931.620
	Tambah/Tambah						
100	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	0	0	0	0	0	0
102	Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
103	Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0
	Pembelian Penghapusan	0	0	0	0	0	0
104	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
	Tambah/Tambah	0	0	0	0	0	0
	Tambah/Tambah						
105	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
106	Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0
	Tambah/Tambah	0	0	0	0	0	0
	Tambah/Tambah						
107	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
108	Saldo Akhir	0	0	0	0	0	0
	Penghapusan Awal dan Penghapusan	0	0	0	0	0	0
	Tambah/Tambah	0	0	0	0	0	0

Tabel 7. Rincian Mutasi Komputer

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak terdapat Alat Eksplorasi (3.11) pada Pengadiln Negeri Bantul



Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

- 12) **Alat Penggeboran (3.12)**  
Tidak Terdapat Alat Penggeboran (3.12) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.
- 13) **Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)**  
Tidak Terdapat Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.
- 14) **Alat Bantu Eksplorasi (3.14)**  
Tidak terdapat Alat Bantu Eksplorasi (3.14) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.
- 15) **Alat Keselamatan Kerja (3.15)**  
Tidak terdapat Alat Keselamatan Kerja (3.15) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.
- 16) **Alat Peraga (3.16)**  
Tidak terdapat Alat Peraga (3.16) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.
- 17) **Peralatan Proses/Produksi (3.17)**  
Tidak Terdapat Peralatan Proses/Produksi (3.17) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.
- 18) **Rambu-Rambu (3.18)**  
Tidak terdapat Rambu-Rambu (3.17) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.
- 19) **Peralatan Olahraga (3.19)**  
Tidak Terdapat Peralatan Olahraga (3.19) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.



#### Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun 2025 sebesar Rp3.607.825.318,00 (Tiga milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

#### Monitoring Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp700.000,00 dengan rincian menjadi aset sebagai berikut:

Kategori Barang	Nilai	Keterangan
Peralatan Mesin	Rp 700.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sesuai

Tabel 6. Monitoring Belanja Modal Peralatan dan Mesin

#### 4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Milik Negara Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025 sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp7.776.274.290,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan nilai BHN berupa saldo awal laporan sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp7.776.274.290,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2025 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp7.264.177.290,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 2 unit dengan nilai Rp7.264.177.290,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).



Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intakumulatif	Ditakumulatif
<b>Saldo Awal</b>			
000	Saldo Awal TA19	Rp 7.776.374.100,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Bertambah</b>			
100	Saldo Awal	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Pembelian	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Transfer Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Hibah Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
106	Penyiswaan Pombangunan Banga	Rp 0,00	Rp 0,00
106	Pembatalan Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 8.187.478.280,00	Rp 0,00
112	Perolehan Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
113	Penyiswaan Pombangunan Janga	Rp 0,00	Rp 0,00
113	Reklasifikasi Masuk dan Perolehan	Rp 0,00	Rp 0,00
120	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra	Rp 0,00	Rp 0,00
200	Pengembangan Nilai Aset Langsung	Rp 0,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 1.109.788.000,00	Rp 0,00
206	Penggunaan Aset Tetap Berwujud	Rp 0,00	Rp 0,00
206	Pengembangan Melalui IPP	Rp 0,00	Rp 0,00
206	Koreksi Manual	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 7.297.177.280,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Berkurang</b>			
214	Koreksi Saluran	Rp 0,00	Rp 0,00
226	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Transfer Saluran	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Hibah Saluran	Rp 0,00	Rp 0,00
304	Reklasifikasi Saluran	(Rp 7.284.177.280,00)	Rp 0,00
306	Koreksi Pencatatan	Rp 0,00	Rp 0,00
309	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Inti	Rp 0,00	Rp 0,00
400	Penggunaan Aset Dari Penggunaan	Rp 0,00	Rp 0,00
400	Penggunaan kembali SPP yang sudah dibebaskan pemenuhan	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 7.284.177.280,00)	Rp 0,00
Saldo		Rp 7.776.374.280,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 8.709.228.840,00)	Rp 0,00
Total (Saldo + Akumulasi Penyusutan)		Rp 3.066.297.440,00	Rp 0,00

Tabel 9. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2 digabung ke dalam Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1.



- b. Koreksi Perubahan Nilai Bertambah akibat dari koreksi pada poin a
- c. Reklasifikasi Keluar Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terjadi karena perubahan kodefikasi BMM.
- d. Reklasifikasi Masuk Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terjadi karena perubahan kodefikasi BMM.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung (401) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KDL	KETERANGAN	SALDO AWAL PERIODE		MUTASI TAHUNAN		SALDO AKHIR PERIODE	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
401	Bangunan Gedung	0	Rp 7.226.277.292,00	0	Rp 7.226.277.292,00	0	Rp 7.226.277.292,00
401	Bangunan Gedung	0	Rp 7.226.277.292,00	0	Rp 7.226.277.292,00	0	Rp 7.226.277.292,00
	Mutasi Tambah						
401	Bahan Baku	0	0	0	0	0	0
401	Perbaikan	0	0	0	0	0	0
401	Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
401	Mutasi Masuk	0	0	0	0	0	0
401	Mutasi/Transf. Masuk	0	0,00,000,000	0	0,00,000,000	0	0
401	Saldo/Perbaikan/Transf. Berjalan	0	1.226.700,000	0	1.226.700,000	0	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0	7.226.277.292,00	0	7.226.277.292,00	0	0
	(Saldo) Berjalan						
401	Mutasi/Transf. Keluar	0	0,000,000,000	0	0,000,000,000	0	0
	Jumlah Mutasi Keluar	0	0,000,000,000	0	0,000,000,000	0	0

Tabel 10. Rincian Mutasi Bangunan dan Gedung

2) Monumen (402)

Tidak terdapat Monumen (402) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

3) Bangunan Menara (403)

Tidak terdapat Bangunan Menara (403) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

4) Tugu Titik Kontrol/Fasri (404)

Saldo Titik Kontrol/Fasri (404) pada Pengadilan Negeri Bantul



Periode Semester II Tahun 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KRS	PUSAT/LOKASI/FAKSI	KUMULASI UTUK & BERTAKLIFIKASIAL		TITIK ANTIPTIKAL		BENTUK ANTIPTIKAL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
	Saldo per 31 Desember 2024	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
	Saldo per 1 Januari 2025	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
	Mutasi Tambah						
100	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	0	0	0	0	0	0
102	Miscellaneous	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0	0	0	0	0	0
	Mutasi Kurang						
200	Saldo Persewaan/ Sewa	0	0	0	0	0	0
201	Rehabilitasi Jalan	0	0	0	0	0	0
202	Saldo Persewaan	0	0	0	0	0	0
203	Penghapusan Kalkulasi Dan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0	0	0	0	0	0

Tabel 11. Rincian Mutasi Tugu Tiang Kontrol/Faksi

#### Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun 2025 sebesar Rp6.104.538.185,00 (enam milyar seratus empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

#### 5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat jalan, jembatan, irigasi dan jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

#### 6. Aset Tetap Renovasi

Tidak terdapat Aset Tetap Renovasi Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

#### 7. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025 sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.742.062,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus



empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.342.062,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah). Tidak terdapat nilai mutasi tambah dan mutasi keluar.

Rincian Mutasi Aset Tetap lainnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakompleksi	Ekstrakompleksi
<b>Saldo Awal</b>			
000	Saldo Awal Tert.	Rp48.342.062,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Bertambah</b>			
100	Saldo Awal	Rp 0,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 0,00	Rp 0,00
102	Transfer Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
103	Hibah Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 0,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Berkurang</b>			
201	Koreksi Pencatatan Awal Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
202	Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
203	Hibah Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan	Rp 0,00	Rp 0,00
205	Penghapusan Awal Dan Pengukuran	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		Rp 0,00	Rp 0,00
Saldo		Rp 48.342.062,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Pengukuran		Rp 0,00	Rp 0,00
Total (Saldo + Jumlah Mutasi Pengukuran)		Rp 48.342.062,00	Rp 0,00

Tabel 12. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang adalah sebagai berikut:

1) **Bahan Perpustakaan (601)**

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Berang Kueser Pengguna Perpustakaan Negeri Rental Periode 21 Desember 2025 sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.342.062,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.342.062,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah). Tidak terdapat nilai mutasi tambah dan mutasi keluar.



2) Barang Bercorak (602)

Tidak terdapat Barang Bercorak (602) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

3) Tanaman (606)

Tidak terdapat Tanaman (606) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun 2025 sebesar Rp0 (nol rupiah).



## V. BMN PADA PENGADILAN NEGARA BANTUL PER 31 Desember 2025

### A. BMN per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara per akun neraca disajikan pada tabel berikut :

No	Akun Neraca	Nilai Bruto Periode Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	POSISI BMN DI NERACA (AksiQ)	21.328.326.326,00	(1.447.706.826,00)	19.880.619.500,00
A	ASET LANCAR	19.861.380,00	(2.888.826,00)	16.972.554,00
1	Persediaan	19.861.380,00	(1.550.526,00)	18.310.854,00
8	ASET TETAP	21.312.288.936,00	(1.450.260.180,00)	19.862.028.756,00
1	Tanah	17.828.890.000,00	0	17.828.890.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.828.008.708,00	12.840.000	3.840.848.708,00
3	Godong dan Bangunan	7.962.706.230,00	0	7.962.706.230,00
4	Jalan, Jembatan, dan Jembatan	0	0	0
5	Aset Tetap dalam Rotorasi	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	48.542.082,00	0	48.542.082,00
7	Centrales Dalam Rotorasi	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.211.898.918,00)	(1.460.851.180,00)	(9.672.750.098,00)
11	BMN NON NERACA	28.299.878,00	(3.868.230,00)	24.431.648,00
1	Ekstrakompabel	23.079.150,00	700.000,00	23.779.150,00
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakompabel	(12.780.272,00)	(4.080.250,00)	(16.860.522,00)
10	TOTAL GABUNGAN (1 + 11)	21.328.626.404,00	(1.451.568.856,00)	19.877.057.548,00

Tabel 13. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



## B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan disajikan pada tabel berikut:

NO	PERIKRAN NERACA	SAK	ASET BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	29.878.496.134,00	29.878.496.134,00	29.878.496.134,00
A	ASSET LANCAR	12.525.775,00	12.525.775,00	12.525.775,00
A.1	Persediaan	12.525.775,00	12.525.775,00	12.525.775,00
B	ASSET TETAP	19.862.964.389,00	19.862.964.389,00	19.862.964.389,00
B.1	Tanah	17.835.890.000,00	17.835.890.000,00	17.835.890.000,00
B.2	Peralatan dan Meubel	3.908.743.708,00	3.908.743.708,00	3.908.743.708,00
B.3	Gedung dan Bangunan	7.962.708.290,00	7.962.708.290,00	7.962.708.290,00
B.4	Jalan, Jembatan, dan Jembatan	0	0	0
B.5	Aset Tetap Lainnya	48.542.062,00	48.542.062,00	48.542.062,00
B.6	Restrukturisasi Dalam Pengadaan	0	0	0
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.895.517.895,00)	(9.895.517.895,00)	(9.895.517.895,00)
C	BMN NON NERACA	6.993.346,00	6.993.346,00	6.993.346,00
1	Ekstrakompabel	22.779.180,00	22.779.180,00	22.779.180,00
2	Alum. Penyusutan Ekstrakompabel	(16.845.800,00)	(16.845.800,00)	(16.845.800,00)
III	TOTAL (I+II)	29.882.423.480,00	29.882.423.480,00	29.882.423.480,00

Tabel 14. Perbandingan Nilai BMN pada LRP dan LK

## VI. INFORMASI BMN LAINNYA

### A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakompabel dan ekstrakompabel) selama 4 (empat) periode laporan Semester II, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	Laporan Semester II 2022	29.361.600.631	-	-
2	Laporan Semester II 2023	29.647.738.131	285.957.500	0,96 %
3	Laporan Semester II 2024	29.540.021.107	(78.716.924)	-0,27 %
4	Laporan Semester II 2025	29.882.249.107	13.240.000	0,045 %

Tabel 15. Perkembangan Nilai BMN Pengabdian Negeri Benteng per Periode Laporan Semester II



## B. Informasi Pengelolaan BMN

### 1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Milai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	MILAI (Rp)	KUANTITAS	MILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	9	17.432.400.000
2	Alas Angkutan Bermotor	0	0	13	896.000.328
3	Peralatan dan Meubel Non TIK	0	0	472	1.110.447.287
4	Peralatan dan Meubel TIK	0	0	348	1.935.825.240
5	Bangunan Gedung	0	0	2	6.346.841.290
6	Rumah Negeri	0	0	8	1.415.565.000
7	Jasa Tetap lainnya	0	0	5.972	48.342.042
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>29.582.261.297</b>

Tabel 16. Penetapan Status Penggunaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

### 2. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Bantul selama periode Semester II Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Pengajaran	Pembelajaran	Pembinaan lingkungan	Pencapaian Peningkatan	UIN Tanjung	UIN Banda	Jumlah
1	Dalam proses pengkajian permasalahan di Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengkajian permasalahan di Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
4	Salah di Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Diseminasi	0	0	0	0	0	0	0
6	4. Bina	0	0	0	0	0	0	0
7	4. Bina	0	0	0	0	0	0	0
8	Dalam proses tindak lanjut kasus Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
9	Tidak dilakukan pengkajian oleh Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
10	Tidak lanjut oleh kasus Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
11	Kasus oleh kasus oleh Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0
12	Supai/ Tidak proses oleh Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 17. Pengkajian EBN di Lingkungan Perguruan Tinggi Nasional



### 3. Pengelolaan BMN Idik

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idik	-
2	Ditstapkan sebagai BMN Idik oleh Pengelola	-
3	Demberitahukan keban sebagai BMN Idik oleh Pengelola	-
4	Telah ditribkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selasa serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 18. Pengelolaan BMN Idik di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

### 4. Pengasuransian BMN

Pengadilan Negeri Bantul mengajukan asuransi BMN kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sebesar Rp3.009.756.000,00 (tiga milyar seribu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nilai premi sebesar Rp9.824.132,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan total aset yang diasuransikan sebanyak 1 aset. Jangka waktu pengasuransian BMN adalah 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Hal tersebut dilakukan demi pengamanan aset yang dikuasai oleh seluruh satuan kerja.

No	Jumlah BMN Yang Diasuransikan	Nilai Perolehan	Nilai Kontrak Pengasuransian
1	1	Rp3.009.756.000,00	Rp9.824.132,00

Tabel 19. Pengasuransian BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

### C. BMN Dari Dana Dekonstrasi

Tidak terdapat Barang Milik Negara dari dana dekonstrasi pada laporan Semester II Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2025.

### D. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Tidak terdapat Barang Milik Negara pada satuan kerja Badan Layanan Umum pada laporan Semester II Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2025.



**E. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)**

Tidak terdapat Barang Milik Negara dari belanja lain-lain pada Laporan Semester II Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

**F. BMN Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

Tidak Terdapat Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola Semester II Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

**G. BMN Berupa SPYBDS**

Tidak terdapat BMN yang masuk sebagai SPYBDS pada Laporan Semester II Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

**H. Usulan Barang Hibah DK/TP**

Tidak terdapat Usulan Barang Hibah DK/TP pada Laporan Semester II Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

**I. Aset Properti Investasi**

Tidak terdapat Aset Properti Investasi yang masuk pada Laporan Semester II Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

**J. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Tidak Terdapat Permasalahan dalam Pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Laporan Semester II Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

**K. Pengungkapan Penting Lainnya**

**1. Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung mengeluarkan suatu regulasi penting dalam tata kelola aset melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/UK-PL.1.2.I/X/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143 /KMA/UK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku 1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Ketersediaan Peradilan, Administrasi Kepagewajiban Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Perurutan, Tata Kearsifan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbandharsan, Prototype Coding



Pengadilan Dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Keputusan ini menjadi pedoman baru standarisasi tata ruang, sarana dan prasarana, prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya karena pedoman sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan peradilan saat ini.

## 1. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan PNBPN dari BMN

---

Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

**COMPANIA SRI LANKA INVESTMENTS PROMOTIONS**  
**ශ්‍රී ලංකා විදේශ ආකර්ෂණ සංස්ථාව**  
**මහලු මහලු මාවත**  
**සමාජ සංස්ථාපන සේවයේ සේවකයන් සඳහා**  
 (වාර්ෂික වාර්ෂික)

ව්‍යාපෘතියේ වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018  
 වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018  
 වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018  
 වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018

වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018  
 වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018  
 වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018  
 වාර්ෂික වාර්ෂික - 2018

වර්ෂය	විස්තරය	වාර්ෂික වාර්ෂික	වාර්ෂික වාර්ෂික			වාර්ෂික වාර්ෂික
			වාර්ෂික වාර්ෂික	වාර්ෂික වාර්ෂික	වාර්ෂික වාර්ෂික	
2018	වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික					
2019	වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික					
2020	වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	100%
2021	වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික	0	0	0	0	0%
	වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	100%
	වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	100%
	වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික වාර්ෂික	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	100%



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Pelaksanaan Pengansuransian BMN

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

## Daftar Laporan Penganggaran BMN Tahun 2025

## Pada Pengadilan Negeri Bantul

No	KPI	Data Barang	Nama Barang	U/P	Label	Tahun Penganggaran	Nilai Realisasi	Penggunaan dan Fungsi BMN	Jangka Waktu	Salinan Fisik	Perkiraan
1.	00000000000000000000	0000000000	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1	Jl. Pahl Di Sesayama S.H. No 00	2025	2025.700.000	Bangunan Gedung Kantor Utama	10 Bulan	8.000.000	100.000 (100%)



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan BMN berupa Rumah Negara

---





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Neraca Tingkat Satker

---

Per 31 Desember 2025

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARACENDRA : 001 | MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : 011 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/KOVINDO : 0003 | M YONGYAKERTA  
SATUAN KERJA : 000121 | PENGADILAN NEGARA SATELIT

Tgl Cetak : 27/01/2026 9:22 AM  
Tgl Data : 27/01/2026 9:23 PM  
Halaman : 1

Url: <http://www.sjswr.kempraktik.go.id>

NAMA PERIKUTUAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	12.025.775	10.081.260	(2.000.000)	(16,46)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>12.025.775</b>	<b>10.081.260</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(16,46)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	17.233.090.000	17.233.090.000	0	0,00
Peralatan dan Meubel	6.099.715.708	5.836.293.708	(263.400.000)	(4,32)
Gedung dan Bangunan	7.940.795.290	7.940.795.290	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	48.342.062	48.342.062	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.009.017.394)	(3.282.066.711)	(273.000.000)	(11,37)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>18.062.945.666</b>	<b>17.315.359.349</b>	<b>(747.586.317)</b>	<b>(4,14)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>19.871.495.134</b>	<b>17.329.326.609</b>	<b>(2.542.168.525)</b>	<b>(12,81)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang Gaji dan Pajak	10.493.997	8.003.000	(2.490.997)	(23,81)
Pembayaran Sertifikat	3.221.047	377.000	(3.044.047)	(23,11)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>13.715.044</b>	<b>8.380.000</b>	<b>(5.335.044)</b>	<b>(38,86)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>13.715.044</b>	<b>8.380.000</b>	<b>(5.335.044)</b>	<b>(38,86)</b>
<b>Ekuitas</b>				
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	16.056.714.290	17.509.726.711	(1.453.012.421)	(8,85)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.056.714.290</b>	<b>17.509.726.711</b>	<b>(1.453.012.421)</b>	<b>(8,85)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.056.714.290</b>	<b>17.509.726.711</b>	<b>(1.453.012.421)</b>	<b>(8,85)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>19.871.495.134</b>	<b>17.329.326.609</b>	<b>(2.542.168.525)</b>	<b>(12,81)</b>

Keseluruhan:  
RUB.

Bangka, 27 Januari 2026  
Perwakilan Jember SATELIT  
Kantor Pengadilan

PERwakilan MAHKAMAH AGUNG  
NIP. 19700419500041202



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Neraca Percobaan (Basis AkruaI)

Per 31 Desember 2025

**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 (NAMA/NAMA ASING)  
 UNIT ORGANISASI : 01 (SADAN ORGANISASI ADMINISTRASI)  
 WILAYAH/KAWASAN : 0000 (DI YONKABARTARA)  
 SATUAN KERJA : 000171 (PENGADILAN NEGARA PARTIAL)

Tgl Cetak : 27/01/26 9:22 AM

Tgl Cetak : 27/01/26 9:23 PM

Halaman : 1

No. laporan percobaan: annual\_satuan\_skr

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
00	11711	Beban Karyawan	11.000,00	0
00	11712	Beban untuk Pemeliharaan	980,000	0
00	12111	Tanah	11.000.000,00	0
00	12211	Peralatan dan Meubel	1.000.743,700	0
00	12311	Gedung dan Bangunan	7.000.000,000	0
00	12321	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.000,000	0
00	12711	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Meubel	0	1.000.000,000
00	12721	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6.700.000,000
00	21212	Beban asuransi yang masih berlaku	0	10.000,000
00	21215	Pembayaran Sewa Karyawan di Muka	0	5.000.000
00	21217	Gedung dan Bangunan Lain	0	6.000.000,000
00	21221	Gedung dan Bangunan Lain	10.000,000	0
00	21227	Tanah Meubel	0	10.000,000
00	21711	Beban	0	21.320.720,700
00	21712	Gedung dan Bangunan Lain	980.000,000	0
00	41101	Pembayaran Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	400,000
00	41102	Pembayaran Penggantian Sewa dan Pemeliharaan Sewa Bangunan	0	11.740,000
00	41103	Beban Sg Pajak PPh	1.000.000,000	0
00	41104	Beban Pemakaian Sg PPh	44,200	0
00	41105	Beban Tery. Karyawan PPh	210.000,000	0
00	41106	Beban Tery. Meubel PPh	80.000,000	0
00	41107	Beban Tery. Bangunan PPh	30.000,000	0
00	41108	Beban Tery. Penggantian PPh	98.000,000	0
00	41109	Beban Tery. PPh PPh	10.000,000	0
00	41110	Beban Tery. Sewa PPh	98.000,000	0
00	41111	Beban yang dibayar PPh	400.000,000	0
00	41112	Beban Tanggapan Jemput PPh	0	0
00	41113	Beban Tery. PPh Pemakai Sewa	400.000,000	0
00	41114	Beban Tanggapan Penggantian Pemakai Sewa	1.000.000,000	0
00	41115	Beban Sg Pajak PPh	112.000,000	0
00	41116	Beban Pemakaian Sg PPh	0	0
00	41117	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	4.000,000	0
00	41118	Beban Tanggapan Asuransi PPh	2.714,000	0
00	41119	Beban Tanggapan Sewa PPh	0	0
00	41120	Beban yang dibayar PPh	30.000,000	0
00	41121	Beban Tanggapan Jemput PPh	1.000,000	0
00	41122	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	400.000,000	0
00	41123	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41124	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41125	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41126	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41127	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41128	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41129	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41130	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41131	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41132	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41133	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0
00	41134	Beban Tanggapan Sewa Sewa PPh	0	0





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Neraca Percobaan (Basis Kas)

Per 31 Desember 2025

## NERACA PERCOBAAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 001 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 MELAYAN PEWANGI : ( 0000 ) DI YOGYAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 000002 ) PENGADILAN NEGARA BANTUL

Tgl Data : 20251203 0:00 AM

Tgl Cetak : 20251203 0:04 PM

Halaman : 1

lap neraca percobaan kas saldo per:

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
01	50110	OPERASIONAL ENTITAS LAIN	0	3,307,438,441
01	50121	OPERASIONAL ENTITAS LAIN	16,301,242	0
10	40121	Pendapatan Sisa Sewa, Gekong, dan Bangunan	0	2,331,381
10	40151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Peralatan sesuai dengan Tarif	0	12,140,380
10	50101	Salah satu bagian PNE	2,057,080,480	0
10	50102	Salah satu bagian PNE	44,480	0
10	50103	Salah satu bagian PNE	215,380,000	0
10	50105	Salah satu bagian PNE	60,710,085	0
10	50106	Salah satu bagian PNE	30,380,000	0
10	50104	Salah satu bagian PNE	158,710,000	0
10	50108	Salah satu bagian PNE	16,301,242	0
10	50109	Salah satu bagian PNE	60,307,000	0
10	50100	Salah satu bagian PNE	90,000,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	11,300,000	0
10	50104	Salah satu bagian PNE	40,000,000	0
10	50100	Salah satu bagian PNE	2,700,000,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	110,000,000	0
10	50102	Salah satu bagian PNE	2,120	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	4,380,000	0
10	50100	Salah satu bagian PNE	2,100,000	0
10	50100	Salah satu bagian PNE	4,000,000	0
10	50100	Salah satu bagian PNE	30,000,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	7,280,000	0
10	50111	Salah satu bagian PNE	401,000,000	0
10	50114	Salah satu bagian PNE	8,140,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	58,000,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	300,000	0
10	50102	Salah satu bagian PNE	700,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	61,000,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	1,001,184	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	2,100,000	0
10	50111	Salah satu bagian PNE	8,000,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	388,000,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	58,100,000	0
10	50111	Salah satu bagian PNE	60,710,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	8,500,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	1,700,000	0
10	50110	Pengalokasian Saldo Pembelian satu bagian PNE	0	300

## NERACA PERCOBAMAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA LINGKARAN : ( 001 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/KAWASAN : ( 000 ) DI YOGYAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 40072 ) PENGADILAN NEGARA BANTUL

Tgl Data : 31/12/25 0:30 AM

Tgl Cetak : 31/12/25 3:24 PM

Halaman : 2

lap neraca percobaan kas saldo per:

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
<b>Jumlah</b>			<b>0,017,700,000</b>	<b>0,017,700,000</b>

Revisi/ang:

TRN

Bantul, 27 Januari 2026

Penanggung Jawab UARPA

Kedua Pengantar Anggaran

  
 DWYH/PTD/000001, E. Kas

NPI: 00000410200004-002



# PENGADILAN NEGERI BANTUL

---

Jl. Prof. Dr. Supomo, Sh No.4, Mandingan, Ringinharjo,  
Kec. Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa  
Yogyakarta

